

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan umumnya dapat di pahami sebagai ketidakmampuan individu ataupun kelompok orang untuk pemenuhan kebutuhan dasar mreka. Menurut Ravallion dalam Arsyad (2010), kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang kelaparan, tidak memiliki rumah, dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan kesehatannya. Secara umum dapat dilihat bahwa masyarakat miskin harus mengalami buta aksara karena ketidakmampuan masyarakat untuk bersekolah, kurang bekerja, takut menghadapi masa depan, kehilangan seseorang karena masalah kesehatan yang kuat. Kita juga dapat mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan, isolasi dan tidak ada rasa kebebasan. Masyarakat miskin tetap terjebak dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu ketidakmampuan untuk: 1) produktif dengan berbisnis, 2) memiliki akses yang beragam terhadap sumber daya sosial ekonomi, 3) menentukan arah nasib sendiri tanpa diskriminasi, 4) menghilangkan mentalitas kemiskinan dan budaya yang selalu mencela diri sendiri - harga diri dan martabat . Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan ini dapat menumbuhkan perilaku dan psikologi yang buruk, yang menyebabkan hilangnya kemandirian untuk berbisnis dan menikmati kemakmuran.

Kemiskinan (kualitas hidup yang rendah) menjadi masalah yang selalu dihadapi engara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak lagi orang miskin yang ditandai dengan

masih banyak yang tidak memiliki kebutuhan dasar dan masih banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terjebak dalam pengangguran.

Menurut Tadaro (2006:12) menjelaskan kapasitas dasar sebagai tiga nilai dasar dari kecukupan jati diri dan kebebasan yang terdapat dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Sehingga Kecukupan dapat diartikan bahwa seseorang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, dandang, Kesehatan dan keamanan.

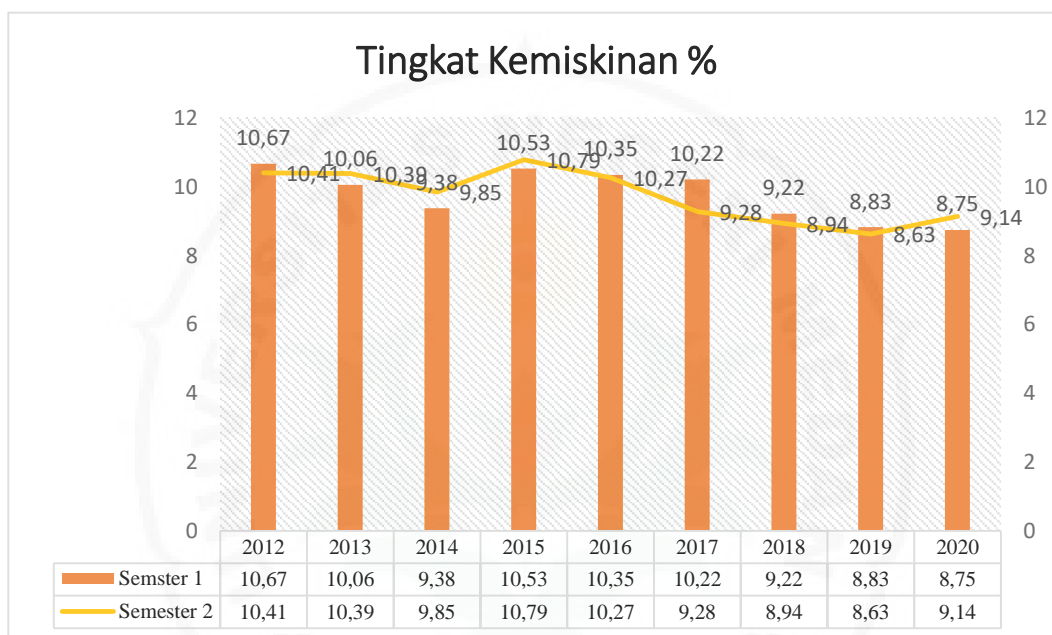
Kegiatan ekonomi memiliki fungsi dasar yang terdiri dari kesediaan keperluan dan kebutuhan dasar atau pokok masyarakat sehingga alat untuk mengukur keberhasilan ekonomi yaitu dengan melihat semakin membaiknya kualitas dari kehidupan pada setiap golongan masyarakat (Ginting, 2008:11).

Tentu saja tanggung jawab ini ada pada pimpinan pemerintah pusat Indonesia, dimana pembangunan merupakan motor penggerak dan penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, akan tetapi tentunya sama jika berlangsung secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor (M.Kuncoro 2010:33)

Masalah kemiskinan ekonomi sudah ada sejak lama, tidak hanya masalah kemiskinan materi, tetapi kemiskinan karena tidak menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, gizi dan pelayanan lain untuk hidup, kehidupan material dan spiritual.

Provinsi Sumatera Utara memang menjadi provinsi yang kaya SDA tapi belum tereksplorasi dengan maksimal dan merupakan provinsi berkembang

dimana permasalahan yang dihadapi provinsi tersebut hampir sama yaitu masalah tingkat air, tingkat kemiskinan. Grafik berikut menggambarkan angka kemiskinan total di Provinsi Sumatera Utara selama 2 semester setiap tahunnya.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Diolah(2022)

Gambar 1.1 Diagram Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Priode 2012-2020

Gambar 1.1 Perputaran turun naik terjadi 2 (dua) fase, Fase 1 dari Maret 2013 turun menjadi Maret 2014 lalu meningkat menjadi Maret 2017. Fase 2 dari September 2017 hingga September 2019 meningkat lagi dari Maret 2020. Laju kemiskinan - persentase meningkat pada tahap pertama, terutama di September 2013, dari September 2014 sampai September 2015, karena naiknya harga bahan pokok setelah naiknya harga BBM. Sekaligus, peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin di Sumut selama pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia Pada saat Indonesia mengalami keterpurukan pada saat Covid-19 menyerang, pertumbuhan pada sector ekonomi yang sempat melambat menyebabkan sebuah

efek buruk di beberapa sektor seperti meningkatnya Pengeluaran pemerintah, menurunnya tingkat jumlah produksi, menurunnya tingkat investasi serta persepsi dalam penanaman modal. Pada tingkat pengeluaran pemerintah termuat dalam situasi pandemi Covid-19 yaitu APBN maupun APBD pada dasarnya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, namun karena Wabah Covid-19 Dana Alokasi pembangunan meningkat di asumsikan ke penanggulangan bantuan Alat Kesehatan, Obat-obatan, dan bantuan BLT.

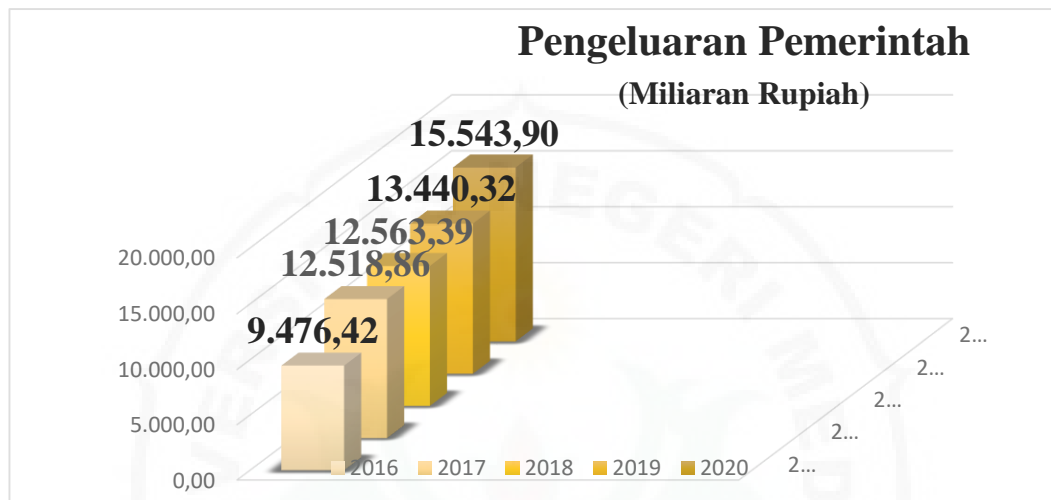
Tiga komponen utama yang menjadi penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh pengeluaran yang penyalurannya belum efektif pada berbagai program yang produktif dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan, Tingkat investasi saat ini masih lebih rendah dari standar yang ada, dan pertumbuhan ekonomi masih lambat.

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang diharapkan pemerintah menjalankan program-program yang sesuai dan tepat sasaran yang guna untuk menurunkan angka tingkat kemiskinan. Penyerapan yang tidak efektif dari pengeluaran pemerintah terhadap program produktif dengan tujuan menekan angka tingkat kemiskinan.

Dengan mengurangi tingkat kemiskinan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk kebijakan fiskal, pemerintah daerah kini mempunyai kekuasaan yang besar dalam perencanaan, perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan keputusan dan program pembangunan yang dapat disesuaikan pada kebutuhan daerah, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (Scott, 2002).

Selalu meningkatnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat

kemiskinan. Berikut telah disajikan grafik yang menggambarkan besaran dari pengeluaran pemerintah di provinsi Sumatera Utara.



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Diolah(2022)

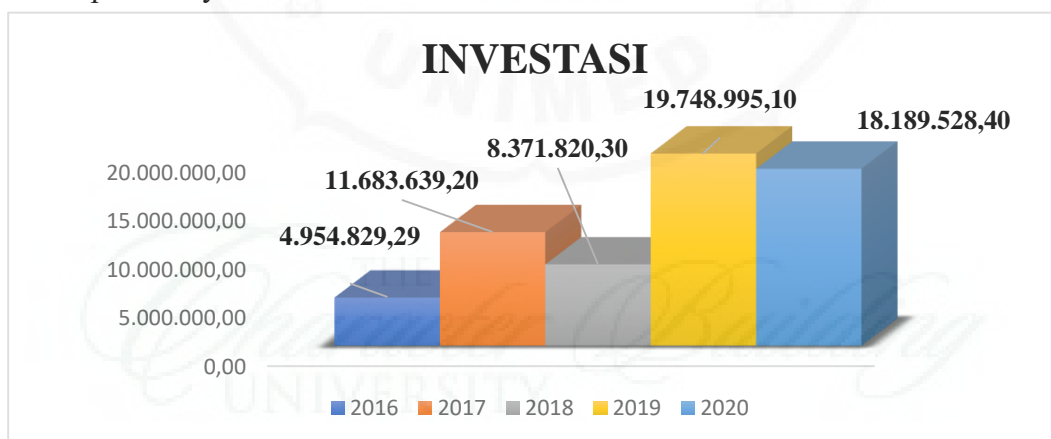
Gambar 1.2 Diagram pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara Priode 2016-2020

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung mengalami kenaikan setiap tahun nya. Kenaikan pengeluaran pemerintah ini diharapkan akan mendorong dalam penanggulangan/pengetasan kemiskinan. Tetapi jika dihubungkan dengan Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai target pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah belum efektif atau tidak tepat sasaran pada program-program pengetasan kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara. Pengeluaran pemerintah tidak selalu dilihat dari kuantitasnya namun dapat dilihat melalui ketetapan dan kesesuaian sasaran dari pengeluaran pemerintah (Osinubi, 2005).

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi beberapa bidang, yakni:(1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) pertanian, (4) bidang infrastruktur, dan (5) subsidi masyarakat. Penelitian Usman (2006) dan Akmad et al.(2012) tentang kebijakan

fiskal di Indonesia pada masa otonomi daerah, terhadap peningkatan belanja khususnya di sektor pertanian memberikan efek peningkatan GDP sektor pertanian yang selanjutnya meningkatkan kinerja pemulihan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Faktor lainnya yang jadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan ialah tingkat investasi yang masih standar. Di daerah lain mana pun, yaitu dengan kondisi pembangunan yang sangat lambat, dapat dikatakan permintaan modal investasi rendah, sehingga pasokan modal yang rendah dan pendapatan yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan yang tinggi. Perbedaan pembangunan ini dan pemusatan investasi di daerah yang lebih maju menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Berikut ini adalah grafik dari investasi yang masuk ke provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.



Sumber: BPS Sumatera Utara, Dioalah 2022

Gambar 1.3 Diagram Perkembangan Investasi di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020

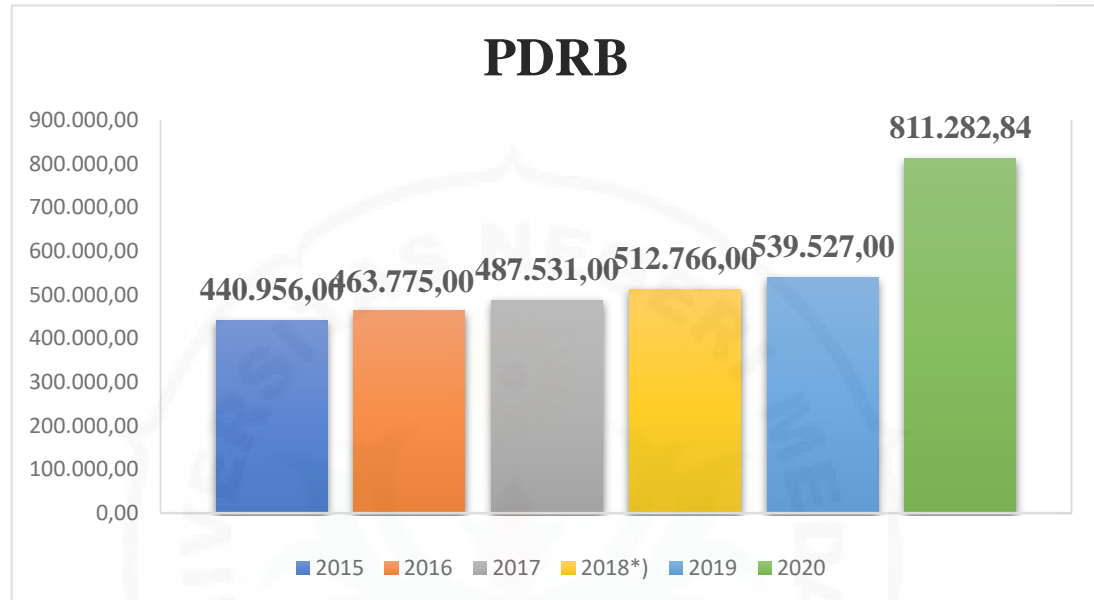
Dari grafik tersebut dapat di peroleh bahwa investasi di Provinsi Sumatera Utaea cenderung Fluktuatif. Dapat dilihat dari tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik diangka (19.748.995,10) dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya masih terbelang rendah, tetapi di lihat pada tahun 2020 ada penurunan kembali dikarenakan pada tahun 2020 keadaan Indonesia yang terkena dampak Covid-19. Tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan suatu daerah. Investasi dapat menjadi alat untuk mengukur kesuksesan dan kesinambungan pembangunan kedepan, dikarenakan terjadi penyerapan tenaga kerja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk penduduk sehingga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Adhisamita (2005:21) berpendapat bahwa investasi adalah reservoir akumulasi, turun ke daerah yang tidak beruntung. Peningkatan permintaan mengarah pada pendapatan dan pendapatan akan meningkatkan tingkat investasi, yang terjadi di daerah perkotaan yang sedang berkembang.

Di banyak negara, dalam menciptakan pengentasan kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan, ada satu kriteria yang harus dinilai yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukanlah guna mengurangi kemiskinan namun pertumbuhan ekonomi diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya jika penduduk miskin tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Wongsodesmiwati, 2009).

Pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan indikator penting dari kehidupan ekonomi di setiap negara di dunia. Lihatlah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam statistik suatu negara untuk melihat apakah negara tersebut menurun atau meningkat, tergantung apakah tingkat pendapatan Anda tinggi atau rendah. (Tadaro, 2000).

Berikut ini merupakan Diagram PDRB di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara , Diolah (2022)

Gambar 1.4 Diagram PDRB Provinsi Sumatera Utara Priode 2015-2020

Gambar 1.4 menunjukkan PDRB Provinsi SUMUT mengalami peningkatan terus-menerus dalam jangka waktu setiap tahun. Peningkatan PDRB ini cenderung mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa dengan peningkatan PDRB setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak mampu mengurangi kemiskinan diprovinsi Sumatera Utara sesuai target yang di tetapkan pemerintah. Hasil studi empiris Millis dan Pernia (1993) dengan menggunakan metode analisis lintasnegara memperlihatkan bahwasanya ketika pertumbuhan PDRB mempercepat tingkat kemiskinan negara, maka tingkat kemiskinan negara tersebut menjadi lebih rendah (Tambunan, 2011). Pergerakan tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi dan investasi yang tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi yang stabil belum tentu dapat

memenuhi kebutuhan tatanan masyarakat yang digolongkan atas penduduk yang miskin.

Peningkatan PDRB yang di ikuti dengan peningkatan pengeluaran pemerintah dan nilai investasi yang fluktuatif ternyata tidak terlibat mampu mengurangi tingkat kemiskinan jika tidak dikelola secara optimal atau jika tidak dikelola secara optimal atau jika tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inventasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan dalam sub latar belakang diatas, sehingga disimpulkan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada ketimpangan Pengeluaran Pemerintah diprovinsi sumatra utara
2. Masih adanya ketidak merataan pembangunan di Beberapa Wilayah provinsi sumatera utara
3. Menerunnya Investasi dan Persepsi Penanaman modal semenjak pandemic Covid-19

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mengindari tidak berfokusnya penelitian ini pada permasalahan dan penafsiran yang terlalu luas maka dilakukan pembatasan pada masalah. Dengan latar belakang permasalahan diatas, sehingga permasalahan yang akan di kaji pada peneltian ini dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan identifikasi masalah, sehingga peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian terkait faktor-faktor analisis kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2001-2020. Oleh karena itu, permasalahan dari penelitian ini ialah:

1. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah ada pengaruh Tingkat Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Investasi ,dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2001-2020.
2. Menganalisa pengaruh Tingkat Investasi terhadap kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2001-2020.
3. Menganalisa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provisi Sumatera Utara pada tahun 2001-2020.
4. Menganalisa pengaruh Pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan

ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil daripada penelitian ini tentunya di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi berikut:

1. Bagi instansi, penelitian ini harapanya mampu jadi masukan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan pengeluaran pemerintah, investasi dan APBD.
2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk para pengambil keputusan dalam hal penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.
3. Sebagai bahan informasi dan refrensi untuk penelitian berikut tentang masalah kemiskinan.
4. Sebagai informasi mengenai perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.



THE
Character Building
UNIVERSITY